Catatan: Naskah ini dikirim ke KOMPAS

Makan Siang Bergizi Gratis: Berdayakan BUMdes

(Sirman Purba: Dosen Paska Sarjana Univ. Tama Jagakarsa)

Tujuan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, melalui program makan bergizi gratis adalah untuk meningkatkan kualitas hidup generasi muda Indonesia. Mereka berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu, mendapatkan akses yang memadai terhadap nutrisi. Prabowo dan Gibran berharap program ini dapat mendukung peningkatan prestasi belajar anak-anak, mengurangi tingkat stunting, dan secara keseluruhan menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.

Namun, program makan siang bergizi gratis rentan terhadap risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menghadapi tantangan dalam hal logistik, distribusi, dan manajemen. Selain itu, program ini juga berisiko mengalami ketidakmerataan investasi, serta masalah terkait kualitas dan variasi makanan.

Korupsi: Program berskala besar seperti ini rentan terhadap penyalahgunaan dana jika tidak diawasi dengan ketat. Dana yang seharusnya digunakan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kolusi dan Nepotisme: Ada kemungkinan penunjukan pemasok atau penyedia jasa dilakukan berdasarkan hubungan pribadi atau politik, bukan berdasarkan kompetensi dan kualitas layanan mereka. Hal ini dapat mengurangi efektivitas program dan merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lain yang lebih kompeten.

Distribusi: Mengelola distribusi makanan ke seluruh pelosok Indonesia adalah tantangan besar. Daerah-daerah terpencil sering kali sulit dijangkau, yang dapat menyebabkan keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam pengiriman makanan.

Manajemen: Koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, sekolah, dan penyedia makanan, memerlukan sistem manajemen yang sangat efisien. Tanpa manajemen yang baik, program ini bisa berujung pada kekacauan logistik dan administrasi. Tantangan terbesar adalah menetapkan siapa saja yang berhak menerima dan menikmati makanan bergizi gratis.

Ketidakmerataan Investasi: Jika program lebih banyak berfokus pada daerah atau UMKM tertentu, daerah-daerah lain yang juga membutuhkan dukungan dan pengembangan ekonomi bisa terabaikan. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan ekonomi antara daerah yang mendapatkan investasi dan yang tidak. Investasi yang tidak merata juga dapat menghambat pengembangan ekonomi lokal di beberapa daerah yang seharusnya menjadi target utama program ini.

Kualitas: Menjamin kualitas makanan yang disediakan merupakan tantangan besar. Tanpa standar yang jelas, makanan yang diterima oleh anak-anak mungkin tidak memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan.

Variasi: Kurangnya variasi dalam makanan dapat menyebabkan kebosanan di kalangan anak-anak dan berpotensi meningkatkan jumlah makanan yang terbuang. Menu yang monoton tidak hanya membosankan tetapi juga mungkin tidak mencukupi semua kebutuhan gizi anak-anak.

Solusi optimal untuk mengatasi semua tantangan dan risiko yang disebutkan di atas adalah memberdayakan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai pemasok atau penyedia makanan bergizi gratis. Pemberdayaan BUMDes merupakan salah satu strategi pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2014, BUMDes adalah entitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk mengelola potensi ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Penunjukan langsung BUMDes di setiap desa sebagai penyedia makanan bergizi gratis secara otomatis akan mengurangi kolusi dan nepotisme yang sering muncul dalam proses seleksi terbuka. Penunjukan BUMDes juga menghemat waktu dan biaya yang biasanya diperlukan dalam proses seleksi terbuka. Hal ini memungkinkan program dilaksanakan segera tanpa penundaan yang sering kali terjadi akibat proses seleksi yang panjang dan rumit.

BUMDes juga rentan terhadap korupsi, seperti menyediakan makanan di bawah standar kualitas dan kuantitas yang ditetapkan. Namun, sebagai entitas yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakat dan pemerintah desa, BUMDes memiliki mekanisme pengawasan yang lebih kuat dibandingkan penyedia yang beroperasi secara individu. Secara rutin, BUMDes wajib melaporkan kinerjanya kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa. Hal ini dapat secara signifikan mengurangi korupsi, dan jika pun terjadi korupsi, dampaknya dirasakan dan dinikmati bersama oleh penduduk desa.

Penunjukan satu BUMDes per desa sebagai penyedia program makanan bergizi gratis adalah langkah strategis yang dapat mendorong pemerataan investasi hingga ke desa-desa yang paling terpinggirkan dan miskin. Langkah ini tidak hanya membantu distribusi sumber daya yang lebih adil, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi kesenjangan antara desa yang maju dan tertinggal. Dengan demikian, program ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan di seluruh Indonesia.